

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### V.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dari 34 provinsi di Indonesia yang telah diurutkan melalui system *outranking*, terdapat 17 provinsi yang memiliki nilai Phi positif dan 17 Provinsi yang memiliki nilai Phi negatif di tahun 2021 maupun 2022. Terdapat delapan kriteria yang mempengaruhi nilai tersebut, yaitu perubahan suhu, kekeringan & kebakaran lahan, polusi, banjir, lahan sawah irigasi, jumlah petani, PDRB pertanian, dan jumlah pasar. Provinsi yang memiliki nilai Phi positif didominasi dengan provinsi yang tentunya berada pada posisi IKP yang tinggi.

Dari hasil yang telah didapatkan, dapat disimpulkan bahwa provinsi dengan kemampuan adaptasi terhadap perubahan iklim paling baik adalah provinsi Sulawesi Selatan yang berada di urutan pertama tahun 2022 yang juga seiring dengan posisi IKP provinsi ini yaitu pada peringkat tiga dengan angka 81,38%. Dengan enam kriteria unggulan yang nilai Phi-nya berada mendekati angka 1, yaitu perubahan suhu, kekeringan & kebakaran lahan, lahan sawah irigasi, jumlah petani, PDRB pertanian, dan jumlah pasar. Hal ini juga membuktikan bahwa provinsi atau wilayah alternatif ini mampu untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim guna mencapai ketahanan pangan. Provinsi dengan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan iklim terburuk menurut perhitungan yang telah dilakukan adalah provinsi Kalimantan Utara. Hal ini dapat dilihat dari hasil *table of ranking* terkini yaitu tahun 2022 bahwa Kalimantan Utara berada pada urutan terbawah yang sebelumnya juga masuk pada peringkat lima provinsi terbawah. Kondisi ini juga cukup beiringan dengan posisi IKP Kalimantan Utara yang mendekati posisi rendah yaitu peringkat 21 dengan angka 71,04. Penyebab utama dari kondisi ini adalah banyaknya kriteria yang melemahkan provinsi tersebut seperti perubahan suhu, kekeringan & kebakaran lahan, lahan sawah irigasi, jumlah petani, PDRB pertanian, dan jumlah pasar. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa provinsi atau wilayah alternatif ini tidak mampu untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim untuk mencapai ketahanan pangan.

Secara keseluruhan provinsi yang memiliki peringkat tinggi pada IKP belum tentu dapat mencapai ketahanan pangan, hal ini dapat terjadi karena pertimbangan kebutuhan layak hidup dan pertumbuhan ekonomi di masing-masing provinsi. Kondisi geografis dan gaya hidup masyarakat juga menjadi penyebab hal tersebut dapat terjadi.

## V.2 Saran

1. Aspek Teoritis
  - a. Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan kriteria ataupun variabel yang berbeda dan lebih variatif terutama dalam aspek ketahanan pangan yang ada di setiap provinsi di Indonesia.
  - b. Penelitian ini berfokus pada 34 provinsi yang ada di Indonesia sehingga yang diteliti sangat besar cakupannya, diharapkan untuk penelitian berikutnya dapat meneliti satu atau beberapa wilayah saja agar dapat lebih fokus dan terarah pada pembangunan ekonomi wilayah tersebut.
  - c. Diharapkan penggunaan metode penelitian Multi Criteria Decision Making PROMETHEE dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya dengan objek penelitian berbeda yang mempengaruhi ketahanan pangan.
2. Aspek Praktis

Pada penelitian ini, kondisi setiap provinsi dalam mencapai ketahanan pangan sangat dipengaruhi oleh faktor dari kondisi geografis dan gaya hidup masyarakat. Terdapat 17 provinsi yang memberikan kontribusi secara positif terhadap ketahanan pangan walau adanya perubahan iklim di Indonesia. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah lebih memperhatikan sektor pertanian setiap provinsi yang dapat menjadi sektor unggulan hampir di setiap provinsi terutama karena Indonesia sangat kaya akan sumber daya alam. Masyarakat juga diharapkan untuk mendukung diversifikasi ekonomi dengan lebih memperhatikan sektor pertanian sehingga dapat mencapai ketahanan pangan.